E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 2 Nomor 1 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE
ON INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel

Petrus Tan [a,1]
[a] *Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, NTT, Indonesia*
[1] thantanpeter@gmail.com

Kata Kunci:
Meritokrasi, Populisme Kanan, Liberalisme, Revitalisasi Wacana Publik

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena populisme kanan berdasarkan pemikiran Michael Sandel tentang tirani meritokrasi. Berbagai literatur sebelumnya memahami populisme kanan sebagai gerakan anti-pluralisme dan anti-globalisasi. Namun, analisis-analisis tersebut gagal memahami bahwa meritokrasi telah memicu kemarahan kelas pekerja dan para pecundang yang diekspresikan dalam gerakan populis. Studi ini memakai metode review literatur dan analisis kritis. Studi ini menemukan bahwa: 1) Meritokrasi adalah keyakinan moral tertentu terhadap prestasi individu yang membenarkan ketimpangan sosial sebagai hal yang fair berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme; 2) Terdapat lima tesis kunci meritokrasi yaitu: nasib seseorang ditentukan prestasi individu; setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya; setiap orang bisa bangkit asalkan bekerja keras; ketimpangan sosial adalah masalah besar-kecilnya penghasilan seseorang yang linear dengan kerja kerasnya; dan pendidikan adalah solusi ketimpangan sosial; 3) Pandangan Sandel dapat menjadi perspektif alternatif untuk membaca populisme di Indonesia. 4) Tantangan populisme kanan dapat dijawab melalui revitalisasi diskursus publik. Studi ini menyimpulkan bahwa meritokrasi merupakan pemicu populisme kanan di berbagai negara demokrasi, termasuk Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8484
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Meritocracy, Right-Wing Populism, and the Revitalization of Public Discourse: A Philosophical Perspective of Michael Sandel

Keywords:
Meritocracy, Right-Wing Populism, Liberalism, Revitalization of Public Discourse. .

Abstract

This article aims to elaborate the phenomenon of right-wing populism based on the thought of Michael Sandel on the tyranny of meritocracy. Various previous literatures understand right-wing populism as an anti-pluralism and anti-globalization movement. However, these analyses fail to see that meritocracy has fueled the anger of working class and the losers as expressed in the populist movement. This study uses literature review and critical analysis methods. This study indicates that: 1) Meritocracy is a certain moral belief in individual success that justifies inequality as fair based on the basic principles of liberalism; 2) There are five key theses on meritocracy that trigger right-wing populism, namely: a person's fate is determined by individual success; everyone is responsible for their life; everyone can rise as long as they work hard; social inequality is a problem of person's income which is linear with their hard work; and education is a solution of social inequality; 3) Sandel's criticism on meritocracy can be an alternative perspective to analyze populism in Indonesia. 4) The challenge of right-wing populism can be answered by revitalizing public discourse. This study concludes that meritocracy is a trigger for the right-wing populism in various democratic countries, including Indonesia.

Pendahuluan

Selama empat dekade terakhir, demokrasi di seluruh dunia dibanjiri dendam, frustrasi dan murka. AS, Venezuela, Inggris, Thailand, Turki, Hungaria, Polandia, Rusia, dan negara-negara lain yang pernah menjanjikan harapan demokratis, dalam berbagai tingkat, terjungkal ke jurang otoritarianisme.[1] Tepat apa yang dikatakan ahli demokrasi terkemuka, Larry Diamond, bahwa negara-negara sedang berada dalam "masa resesi demokrasi."[2] Krisis demokrasi bertepatan dengan kebangkitan partai-partai populis sayap kanan radikal di Eropa, Amerika, dan dalam beberapa kasus,

[1] Andreas Bergh dan Anders Karna, "Globalization and Populism in Europe," *Public Choice* 189, no.51 (2021), 1-2.

[2] Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *How Democracy Die* (UK: Penguin Books, 2018), 204.

di Asia.[3] Kemenangan Trump dalam pemilu AS 2016, propaganda Le Pen yang memikat massa tentang dominasi pekerja migran di Prancis,[4] *Brexit* di Inggris, dan pemelintiran sentimen agama di Indonesia dalam pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017, pemilu Presiden 2019 serta Aksi Bela Islam 212, dikenal sebagai deretan fenomena populisme kanan.[5] Menurut Swank dan Betz, kebangkitan reaksi populis terjadi bersamaan dengan meningkatnya integrasi internasional, pasca-industrialisasi, dan nilai-nilai pasca-materialis dalam masyarakat liberal.[6] Melalui serangkaian fenomena tersebut, tampak bahwa kejayaan demokrasi (liberal) sedang menghadapi tantangan yang menyeruak dari protes dan reaksi-reaksi populis.

Sejumlah studi telah dibuat untuk menjawab mengapa populisme kanan dan partai-partai sayap kanan radikal bangkit bahkan di negara-negara dengan tradisi politik dan demokrasi liberal yang kuat. Berdasarkan asumsi bahwa perasaan kolektif rentan diinstrumentalisasi oleh para politisi populis sayap kanan untuk menarik perhatian massa, Anderson dan Secor (2022) berargumen bahwa akar populisme kanan adalah perluasan rasa benci dan marah melalui propaganda anti-imigran, ultra-nasionalisme, anti-gender, rasisme dan anti-minoritas agama.[7] Dengan membuat distingsi antara "politik serangan" dan "politik penghinaan", Winberg (2017) dalam studinya menemukan bahwa populisme kanan di AS, Eropa dan beberapa negara demokratis tidak semata-mata dipicu oleh sentimen politik agresif dan kampanye negatif, melainkan terutama oleh *insults politics* (politik penghinaan). Menurutnya, berbeda dari politik serangan, politik penghinaan diarahkan pada kelompok masyarakat yang merasa kalah dengan tujuan untuk membangkitkan kebencian terhadap elit.[8] Studi yang dibuat Hara (2018) tentang kompetisi elektoral antara Jokowi dan Prabowo pada 2014 menunjukkan bahwa populisme kanan di Indonesia dipicu oleh politisasi identitas Islam dan propaganda anti-minoritas yang menciptakan polarisasi sosial dan disrupsi demokrasi secara keseluruhan.[9]

Studi lain memperlihatkan, populisme kanan berakar pada fakta bahwa proses-proses globalisasi gagal memberi perhatian yang memadai terhadap

[3] Berg dan Karna, 5.

[4] F. Budi Hardiman, "Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis," *Prisma* 36, no. 2, (2017), 5.

[5] Dinda Rizkimawati dan Indra Kusumawardhana, "State and Right-Wing Populism: Analysis on the Kemenko Polhukam RI Persuasion Approach in Responding the Wave of "212" Movement," *Journal of Islamic World and Politics*. 5, no. 1 (2021), 5.

[6] Duane Swank dan Hans-Georg Betz, "Globalization, the Welfare State, and Right Wing Populism in Western Europe," *Socio Economic Review* 1, no. 2 (2003), 216.

[7] Ben Anderson dan Anna Secor, "Propositions on right-wing populism: Available, excessive, optimistic," *Political Geography* 96 (2022), 2. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102608

[8] Oscar Winberg, "Insult Politics: Donald Trump, Right-Wing Populism, and Incendiary Language," *European Journal of American Studies*, 12, no. 2 (2017), 3.

[9] Abubakar Eby Hara, "Populism in Indonesia and its Threats to Democracy," *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017).* (Dordrecht: Atlantis Press, 2018), 106.

mereka yang tidak terampil, menganggur, dan tidak berpendidikan. Sentimen populis tumbuh karena kelompok-kelompok yang tertinggal oleh globalisasi tidak terwakilkan suaranya dalam partai politik arus utama.[10] Dani Rodrik (2021) misalnya menemukan bahwa dukungan terhadap Trump berkorelasi dengan goncangan globalisasi yang meskipun berhasil melewati perbedaan budaya dan identitas namun menciptakan krisis baru bagi kelompok-kelompok yang tertinggal secara ekonomi.[11] Korelasi antara globalisasi ekonomi dan gelombang populisme kanan diperkuat oleh studi yang dibuat oleh Autor, *et al* (2020), Dippel *et al* (2015) dan Colantone & Stanig (2018). Mereka memperlihatkan bahwa perdagangan dengan Cina (Tiongkok) telah menimbulkan penetrasi impor yang berlebihan di Eropa, diikuti perubahan kebijakan dalam lapangan kerja manufaktur yang menekan para pekerja, dan sebagai hasilnya, dukungan terhadap partai-partai ekstrem kanan meningkat.[12] Dalam konteks Indonesia, Rakhmani dan Saraswati (2021) menunjukkan bahwa gelombang populisme dipicu oleh pergeseran basis sosial dan ekonomi akibat globalisasi dan lemahnya jaminan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Menurut mereka, telah terjadi ketimpangan yang terus meningkat sejak tahun 2000, meskipun pemerintah mengklaim berhasil mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dinikmati hanya oleh 20% kelompok teratas, sedangkan separuh terbesar kelompok bawah tidak merasakan apapun.[13] Studi-studi ini secara tepat disimpulkan oleh pernyataan Fukuyama: "Saya setuju dengan penilaian umum bahwa kebangkitan populisme dipicu oleh globalisasi dan peningkatan kesenjangan di banyak negara kaya."[14]

Berbagai studi di atas memperlihatkan dua model diagnosis yang lazim diajukan untuk menjawab pertanyaan mengapa populisme bangkit. Diagnosis pertama memahami kemarahan populis sebagai reaksi buruk atas meningkatnya keragaman etnis, agama, atau gender. Menurut diagnosis ini, memperkuat nilai-nilai liberal dan mempromosikan masyarakat terbuka adalah jalan keluar efektif. Diagnosis kedua mengaitkan populisme dengan kebingungan dan dislokasi yang dialami kelas pekerja dalam menjawab tuntutan globalisasi dan teknologi. Menurut diagnosis ini, para buruh yang tidak terampil dan tidak inovatif merasa terkilir menghadapi kenyataan

[10] Donovan Haak and Dries Deweer, "Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy," *Populism* 5, no.1 (2022), 25.

[11] Dani Rodrik, "Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism," *Annual Reviews of Economics,* 13, no.1 (2021), 135.

[12] Autor, D., Dorn, D., Hanson, G., & Majlesi, K., "Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure," *American Economic Review*, 110, no. 10 (2020), 3140. Bdk. Colantone, I., & Stanig, P., "The trade origins of economic nationalism: Import competition and voting behavior in Western Europe," *American Journal of Political Science 62*, no. 4 (2018), 950.

[13] Inaya Rakhmani dan Muninggar Sri Saraswati, "Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 3 (2021), 438.

[14] Bergh and Karna, "Globalization and Populism," 52.

bahwa banyak pekerjaan konvensional telah beralih ke negara-negara berupah rendah atau telah dikerjakan oleh *Artificial Intelligent*. Keadaan ini memicu frustrasi dan marah yang diekspresikan dalam gerakan anti-imigran, pemblokiran batas negara, dan anti-elit.[15] Diagnosis ini menekankan pendidikan di universitas sebagai kunci menghadapi globalisasi. Basis teoretis diagnosis pertama adalah konsep Durkheim tentang "masyarakat massa". Proses industrialisasi dan birokratisasi menurut Durkheim telah mendorong atomisasi, mencerabut akar-akar sosial dan identitas individu, dan menciptakan situasi *anomie*. Dalam situasi kehilangan identitas, populisme kanan membentuk "kesadaran kolektif" dan identitas bersama melalui penyebaran sentimen anti-imigran, ultranasionalisme dan anti-minoritas. Sedangkan basis teoretis diagnosis kedua adalah perspektif ekonomi Down. Melalui aplikasi teori pilihan rasional, Down berpendapat bahwa warga negara (pemilih dan politisi) hanya menginginkan maksimalisasi kepentingan diri material. Ketika globalisasi membawa keuntungan bagi elit politik kaya dan keterpurukan bagi warga negara yang tidak terampil dan tidak berijazah sarjana, populisme kanan pun membuncah.[16]

Studi-studi maupun dua teori dan diagnosis tersebut meskipun valid, belum mampu memberi jawaban memuaskan atas dua pertanyaan berikut. Jika akar masalahnya adalah sentimen anti-multikulturalisme, mengapa reaksi populis justru pecah di negara-negara dengan tradisi politik dan demokrasi liberal yang kuat, yang telah lama memegang teguh keyakinan liberalisme tentang kesetaraan, pluralisme dan toleransi? Dan jika akar masalahnya adalah kekecewaan masyarakat yang tidak terdidik dan tidak terampil terhadap globalisasi serta ketimpangan pendapatan yang ditimbulkannya, mengapa populisme kanan justru bangkit di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan lain-lain yang cukup suskes mewujudkan *welfare state* dengan sistem jaminan sosial yang lebih murah hati?

Dua pertanyaan tersebut mengganggu penelitian ini, dan karena itu, berbeda dari berbagai studi di atas, penelitian ini berupaya menguraikan akar populisme kanan dari perspektif berbeda yaitu perspektif "tirani meritokrasi" yang dikembangkan oleh Michael Sandel dalam bukunya, *The Tyranny of Merit*. Menurut Sandel, meritokrasi adalah keyakinan moral bahwa berdasarkan gagasan liberal tentang persamaan peluang yang *fair,* orang kaya pantas menghirup kekayaan mereka sepuas-puasnya sedangkan bagi orang-orang miskin, tidak ada yang perlu dikutuk selain diri sendiri. Bagi Sandel, keyakinan ini menciptakan frustrasi dan penghinaan moral

[15] Andrew Halterman, Nicholas Halterman dan Jill Irvine. "How Right Wing is Right Wing Populism?," *Political Science* 22 (2018), 54.

[16] Haak and Deweer, "Discontent with Procedural," 24-25.

bagi para pekerja dan mereka yang tertinggal oleh globalisasi. [17]Arogansi elit dan penghinaan moral inilah yang memicu ledakan murka dalam bentuk reaksi populis.

Kesimpulan tersebut bertepatan dengan kajian Sandel bahwa sebagian kecil para pemilih Trump di AS baik pada pemilu tahun 2016 maupun 2020, mungkin memiliki tendensi rasis, xenofobik, anti-imigran, anti-Muslim dan anti-globalisasi. Tetapi bagi Sandel, sebagian besar lainnya memiliki keluhan moral yang sah terhadap kenyataan bahwa globalisasi neoliberal telah mengikis harga diri dan nilai kerja keras mereka. Sandel berargumen bahwa gelombang murka akibat penghinaan moral yang mereka rasakan sulit ditangkap oleh politik liberal teknokratis.[18] Secara umum, ada dua jenis keberatan terhadap meritokrasi sebagai proyek politik dan moral. Keberatan pertama yang diajukan oleh para filsuf politik kontemporer terkait dengan keadilan. Menurut mereka, sekalipun meritokrasi diwujudkan secara penuh, di mana pekerjaan dan upah sungguh-sungguh mencerminkan kerja keras dan talenta individu, meritokrasi belum tentu menciptakan masyarakat yang adil. Berbeda dari keberatan pertama, keberatan kedua- yang luput dari pengamatan filosofis- terkait dengan sikap terhadap kesuksesan dan kegagalan. Menurut keberatan ini, meskipun meritokrasi sungguh-sungguh adil, dalam pengertian, orang-orang dihargai menurut bakat dan kerja kerasnya, meritokrasi tetap memicu kepongahan di antara para pemenang dan menyebarkan penghinaan serta kebencian di antara mereka yang kalah.[19] Keberatan kedua inilah inti argumen Sandel tentang meritokrasi.

Karena itu, Sandel pesimis dengan argumen bahwa kemarahan mereka yang tertinggal dapat diatasi dengan memperkuat pandangan-pandangan liberal dan meningkatkan akses ke pendidikan. Sandel sebaliknya menawarkan gagasan revitalisasi diskursus publik sebagai jalan keluar. Menurut Sandel, alih-alih mempertebal keyakinan liberal, partai-partai kiri yang terbenam dalam arogansi meritokratis dan meninggalkan para pekerja sebagai basis massanya, perlu mendengarkan keluhan moral kelompok-kelompok yang merasa dihina oleh seluruh proyek politik teknokratis liberal.[20] Sandel mengusulkan pentingnya mengubah atmosfer diskursus publik dari diskursus teknokratik liberal yang dikuasai oleh segelintir elit dan para ahli kepada diskursus publik yang terbuka terhadap berbagai keluhan moral dan aspirasi dari masyarakat bawah.[21] Berdasarkan gagasan Sandel tersebut, maka berbeda dari argumen dan temuan studi-studi terdahulu, studi ini menawarkan argumen bahwa serangan populis di

[17] M. Sandel, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* (USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020), 103.

[18] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 87.

[19] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 104.

[20] M. Sandel, "Populism, Liberalism and Democracy," *Philosophy and Social Criticism* 44, no. 4 (2018), 354.

[21] Sandel, "Populism, Liberalism, and Democracy," 356.

berbagai negara demokratis di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berakar pada tirani meritokrasi yang muncul bertepatan dengan kegagalan proyek politik progresif selama beberapa dekade belakangan.

Artikel ini memakai pendekatan kualitatif yaitu review literatur dan analisis kritis atas sumber primer yaitu karya-karya Sandel, terutama bukunya, *The Tyranny of Merit*. Karya Sandel lainnya seperti *Liberalism and the Limit of Justice, Democracy's Discontent,* "Populism, Liberalism and Democracy", juga menjadi referensi penulisan artikel ini. Beberapa literatur sekunder tentang pemikiran Sandel dan populisme kanan juga direview secara kritis. Literatur-literatur ini dipilih untuk mendukung argumentasi utama studi ini yaitu bahwa populisme kanan berakar pada meningkatnya meritkorasi yang bertepatan dengan gagalnya proyek politik progresif di berbagai negara demokratis selama dua dekade terakhir.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis populisme kanan dari perspektif Sandel tentang tirani meritokrasi dan kegagalan politik progresif, mendalami gagasan revitalisasi diskursus publik sebagai jalan keluar, serta menunjukkan relevansinya dalam konteks Indonesia. Selain memperkaya perspektif tentang populisme kanan, kontribusi artikel ini adalah merumuskan suatu "benang merah" yang mampu menjelaskan berbagai macam fenomena populisme di berbagai negara demokrasi di dunia, termasuk Indonesia.

Isi dan Pembahasan

Posisi Komunitarian Michael Sandel

Untuk memahami kritik Sandel terhadap meritokrasi, perlu dipahami terlebih dahulu posisi intelektualnya dalam perdebatan filosofis. Sandel lahir pada tahun 1953 di kota Minneapolis, AS. Dia adalah seorang filsuf politik paling berpengaruh dan tenar saat ini dengan beragam julukan: "*global profile of rockstar*", "*the celebrity political philosopher*".[22] Pada tahun 2010, majalah *China Newsweek* menggelarinya sebagai "tokoh asing paling berpengaruh."[23] Sandel sering disebut filsuf komunitarian, walaupun mengaku keberatan dengan label itu. Sejauh komunitarianisme adalah nama lain dari mayoritarianisme, Sandel dengan tegas menolaknya. Namun Sandel menerima arti lain istilah komunitarian yang menjadi isi argumen filsafat politiknya yaitu kritik terhadap konsep diri liberal dan ekses individualisme, atau kritik terhadap visi *laissez faire* kapitalisme pasar.

[22] The Decision Lab, "Michael Sandel, The Celebrity Political Philosopher," https://thedecisionlab.com/thinkers/philosophy/michael-sandel/ (diakses 20 September 2023).

[23] E. Osnos, "China's Encounter with Michael Sandel," dalam *Encountering China. Michael Sandel and Chinese Philosophy* diedit oleh M. Sandel dan Paul J. D'Ambrosio (Massachusets: Harvard University Press, 2018), vii.

Komunitarianisme mengajukan kritik atas teori kontrak sosial yang dikembangkan John Rawls dan liberalisme pada umumnya.[24] Meskipun posisi kaum komunitarian berbeda-beda, fokus kritik mereka sama yaitu pada sifat liberalisme yang terlalu individualistik, sambil menekankan pentingnya tuntutan etis dan pandangan hidup bersama. Atau menurut Sandel, para pemikir komunitarian menantang etika berbasis hak dengan pandangan yang lebih penuh tentang kewarganegaraan dan komunitas.[25] Bersama para filsuf komunitarian, Sandel mengoreksi kelemahan pemikiran Rawls. Menurut Sandel, demokrasi membutuhkan kebangkitan kembali tradisi republik untuk menangkal efek korosif liberalisme kontemporer dan tirani pasar.[26] Sandel berupaya menghidupkan lagi aspek-aspek republikanisme yang telah dihancurkan oleh liberalisme berbasis hak dalam filsafat publik Amerika.

Dalam *A Theory of Justice,* dengan merujuk pada Kant, tesis utama Rawls ialah bahwa etika politik tidak dapat berpijak pada konsep hidup baik sebab setiap konsep hidup baik bersifat partikular, kebetulan dan tak dapat diberi pendasaran universal.[27] Bagi Sandel, keutamaan keadilan menurut Rawls menggambarkan tidak hanya prioritas moral tetapi juga sebagai bentuk justifikasi yang istimewa; bahwa hak mendahului kebaikan, tidak hanya dalam klaimnya tetapi juga karena prinsip-prinsipnya diturunkan secara independen.[28] Bagi liberalisme, masyarakat yang adil tidak berupaya mempromosikan tujuan tertentu tetapi memungkinkan warganya mengejar tujuan mereka sendiri, konsisten dengan kebebasan yang sama untuk semua. Sebagaimana hak mendahului kebaikan, demikian subjek mendahului tujuan-tujuannya.[29] Dengan demikian, seorang liberal kehilangan klaim moral yang mengikatnya dengan dunia kehidupan bersama. Sandel menyebut individu semacam ini sebagai *unencumbered-self. Unencumbered-self* adalah diri yang melayang-layang dalam ruang-ruang kebebasan, tidak terbebani oleh nilai-nilai komunitas, tujuan formatif, dan kalkulus kepentingan sosial.[30] Dalam paradigma liberal, hak-hak individu dijamin oleh negara dimana hak-hak itu tidak tunduk pada kalkulus kepentingan bersama, melainkan berfungsi sebagai kartu truf bagi individu dalam mengejar tujuannya sendiri.

---

[24] Otto Madung, "Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Jurnal Ledalero* 9, no. 2 (2020), 129.

[25] M. Sandel, *Public Philosophy: Essay on Morality in Politics* (Massacusets: Harvard University Press, 2005), 45.

[26] M. Sandel, *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy* (Massachusets: Harvard University Press, 1996), 78.

[27] J. Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University Press, 2009), 36.

[28] M. Sandel, *Liberalism and The Limit of Justice* (USA: Cambridge University Press, 1998), 120.

[29] M. Sandel, "The Procedural Republic and The Unencumbered Self," *Political Theory* 12, no. 1 (1984), 81.

[30] Sandel, "The Procedural Republic," 85.

Implikasi politis pandangan tersebut menurut Sandel ialah hilangnya filsafat publik yang merumuskan diskursus publik yang kuat secara moral. Jika tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama mesti diganti oleh konsep prosedur yang *fair*. Menurut Sandel, sejak akhir abad ke-20, terjadi pergeseran dari filsafat publik yang merumuskan tujuan bersama dengan diskursus moral yang kuat kepada persoalan prosedur yang *fair,* dari republik nasional kepada republik prosedural.[31]Jauh sebelum menganalisis meritokrasi, Sandel dalam *Democracy's Discontent* telah menunjukkan bagaimana konsep diri dan politik liberal tersebut memicu kekecewaan dan krisis demokrasi. Menurut Sandel, partai-partai politik di AS pada tahun 1980-an begitu bersemangat dalam debat tentang topik seperti negara kesejahteraan, perluasan hak individu, dan revolusi pemerintahan, namun gagal menyentuh dua persoalan utama yang mengisi jantung kekecewaan publik terhadap demokrasi. Pertama, ketakutan bahwa secara individual dan kolektif, warga negara kehilangan komitmen pada kebaikan bersama dan solidaritas kolektif, yang semakin terkikis di bawah dominasi politik liberal dan ekspansi globalisasi tanpa batas. Kedua, sebagai akibat privatisasi konsep hidup baik, tatanan moral dalam keluarga, agama hingga negara-bangsa ambruk.[32]

Dua persoalan tersebut disorot kembali dalam prolog *The Tyranny of Merit* bahwa kepanikan AS dan banyak negara demokrasi lainnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 disebabkan oleh "ketidaksiapan moral" karena adanya atmosfer kebencian, renggangnya ikatan sosial dan krisis solidaritas. Bagi Sandel, tahun-tahun menjelang krisis pandemi Covid-19 adalah waktu perpecahan yang mendalam baik secara ekonomi, politik maupun budaya. Pada tahun 2008, ketika terjadi krisis finasial global yang amat hebat, diperlihatkan kebusukan globalisasi yang selama ini terbungkus rapi yaitu jurang ketimpangan antara pemenang (*winners*) dan pecundang (*losers*). Bertepatan dengan menguatnya prinsip liberal tentang tanggung jawab individu, serta kegagalan proyek politik progresif, menguat pula arogansi meritokratis tentang kesuksesan dan kegagalan. Bagi Sandel, keadaan ini memantik reaksi-reaksi intoleran dan kebencian dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh meritokrasi dan seluruh proyek politiknya di banyak negara dalam beberapa tahun belakangan.[33]

Meritokrasi dan Serangan Populis

Populisme kanan adalah fenomena politik dan demokrasi modern. Kebangkitan populisme erat kaitannya dengan penyebaran demokrasi baik sebagai ide maupun sebagai rezim. Namun, sebagaimana Laclau, populisme adalah sebuah konsep yang tak gampang dipahami.[34] Populisme dapat

[31] Sandel, "The Procedural Republic," 94.

[32] Sandel, *Democracy's Discontent,* 3.

[33] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 35.

[34] Ernesto Laclau, *Politics and Ideology in Marxist Theory* (London: NLB, 1977), 143.

dipahami sebagai demokrasi, metode politik, atau ideologi yang menjelma dalam aneka bentuk dan mendukung aneka posisi. Populisme sendiri adalah fenomena politik yang heterogen meskipun para aktor populis tampaknya berbagi wacana yang sama. Seorang aktor populis tak harus kanan, tetapi bisa juga kiri, tak harus konservatif tetapi bisa saja progresif, tak selalu sekular tetapi boleh jadi religius, tak otomatis sosialis tetapi sangat mungkin liberal.[35] Menurut Mudde dan Kaltwasser, meskipun penopang utama bisnis murka dalam populisme kanan berubah-ubah sepanjang waktu, satu faktor yang konstan adalah keluhan sosial-ekonomi dan budaya bahwa hidup "kita" diserang elit liberal yang menggunakan negara untuk mengeksploitasi rakyat.[36] Dalam hubungan dengan elit dan kebenaran, para populis sayap kanan mengembangkan suatu "epistemologi" unik yaitu pemahaman berbeda tentang apa itu kebenaran, dari mana kebenaran berasal, siapa yang memilikinya.[37] Sejalan dengan itu, mereka juga memiliki gagasan berbeda tentang otoritas kepemimpinan politik, seberapa besar kepercayaan terhadap pemerintah, dan otoritas macam apa yang bisa diterima.

Salah satu pendekatan memahami populisme adalah pendekatan antagonistik. Yang ditonjolkan dalam pendekatan ini adalah sifat antagonistik populisme yaitu upaya penaklukan *the other* sehingga disebut "anti-status quo discourse."[38] Inti pendekatan antagonistik adalah pemisahan medan politik ke dalam dua kelas berseberangan yaitu *the people* (rakyat) dan *the other* (elit). *The other* dipahami sebagai semua orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan entah politik, ekonomi atau media. Mereka direpresentasikan dengan term-term seperti oligarki, plutokrasi, penguasa, pemodal, dan lain-lain. *The other* dipandang sebagai perintang kehadiran penuh rakyat dalam politik, pencuri berbaju partai, perusak keadilan sosial. Sebaliknya, *the people* adalah *political actor* yang bertarung melawan *the other*.[39] Baik populisme kiri maupun kanan memakai pendekatan ini. Namun perbedaannya jelas: populisme kiri tak bertujuan membangun rezim populis melainkan membentuk subjek kolektif yang tepat untuk melawan tatanan neoliberal dalam kerangka demokrasi liberal.[40] Sebaliknya, populisme kanan dianggap menghantui demokrasi karena rakyat dalam populisme kanan bukan *demos*, bukan konstruksi diskursif yang dijamin oleh konsep kewarganegaraan yang setara,

[35] Halterman, "How Right Wing," 4.

[36] Cas Mudde dan Cristobal Rovira Kaltwasser, *Populism A Very Schort Introduction* (USA: Oxford University Press, 2017), 25.

[37] Torben Lutjen, "The anti-authoritarian revolt: Right-wing populism as self-empowerment?," *European Journal of Social Theory* 25, no. 1 (2022), 77.

[38] Fransisco Panizza, "Introduction: Populism and the Mirror of Democracy," in *Populism and the Mirror of Democracy*, ed. Fransisco Panizza (London: Verso, 2005), 3-4.

[39] Panizza, "Introduction: Populism," 28.

[40] C. Mouffe, *Populisme Kiri,* diterjemahkan oleh Melfin Zaenuri (Yogyakarta: Antinomi, 2018), 98.

melainkan *mob,* kerumunan murka yang menyempitkan *nation* pada komunitas etnis atau agama.[41]

Mengatasi populisme kanan, Mouffe menganjurkan radikalisasi demokrasi. Karena problem utama menurut Mouffe adalah bahwa prinsip-prinsip konstitutif demokrasi liberal seperti kebebasan dan kesetaraan bagi semua tidak diimplementasikan secara efektif, maka demokrasi liberal perlu diradikalisasi melalui penguatan populisme kiri.[42] Gagasan pemikir post-Marxis tersebut cukup dekat dengan pandangan Sandel tentang populisme sebagai indikasi kegagalan politik progresif. Namun, anjuran memperkuat populisme kiri bagi Sandel tidak cukup sebab populisme bukan hanya protes terhadap ketimpangan sosial-ekonomi tetapi juga reaksi atas arogansi moral meritokrasi yang menyertai ketimpangan tersebut.

Istilah "meritokrasi" diperkenalkan pertama kali oleh sosiolog Inggris, Michael Young, dalam karyanya, *The Rise of Meritocracy 1870-2033* (1958). Menurutnya, meritokrasi adalah keyakinan bahwa prestasi individual adalah ujung tombak kemajuan sosial; atau suatu masyarakat yang diperintahkan oleh suatu pemerintahan dari orang-orang yang dipilih atas dasar *merit* (prestasi). Bagi Young, meritokrasi paradoks. Di satu sisi, meritokrasi adalah prinsip kesetaraan yang menentang nepotisme dan feodalisme, namun di sisi lain, meritokrasi membenarkan ketimpangan antara mereka yang berijazah universitas dan yang tidak.[43] Sandel sepakat bahwa meritokrasi paradoks. Menurut Sandel, di satu sisi, meritokrasi adalah prinsip yang memampukan setiap orang memperbaiki nasib mereka dengan mengasah bakat dan kemampuan individual. Di sisi lain, di era globalisasi pasar, meritokrasi tidak menghapus ketidaksetaraan, malah mempertajamnya.[44] Berbeda dengan Young, argumentasi Sandel terutama menempati sudut pandang filsafat moral untuk mempertanyakan fondasi etis klaim-klaim meritokrasi lalu menghubungkannya dengan populisme, perubahan bentuk politik dan pemerintahan. Bagi Sandel, keangkuhan meritokratis muncul bersamaan dengan mengecilnya ambisi negara kesejahteraan. Bertolak lebih dalam daripada sekadar analisis tentang paradoks meritokrasi, Sandel memandang meritokrasi sebagai sebuah ideologi, dalam pengertian Marx, kesadaran palsu.

Sebagai ideologi, menurut Sandel, meritokrasi perlu dibedakan dari *merit*. *Merit* adalah ide yang baik. Prestasi dan kemampuan seseorang dalam pekerjaan dan peran sosial adalah hal yang baik dalam bidang praktis. Yang dikritik Sandel adalah meritokrasi. Berbeda dari *merit,* meritokrasi adalah sebuah etika yaitu keyakinan dan sikap terhadap prestasi

[41] Catherine Guisan, "Right-Wing Populism and the European Parliament's Agonistic Politics," *Populism* 5, no. 1 (2022), 56.

[42] Oscar Garcia Agustin, *Left-Wing Populism, The Politics of the People* (UK: Emerald Publishing, 2020), 46.

[43] M. Young, *The Rise of Meritocracy 1870-2033, An Essay on Education and Equality* (London: Penguin Books, 1961), 22-23.

[44] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 27.

individu. Keyakinan ini membentuk "*system of rule*" yang didasarkan pada prestasi seseorang. Yang dimaksud *system of rule* adalah cara mengalokasikan pendapatan, kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan harga diri. Etika meritokratis bisa disimpulkan dalam proposisi: "Jika peluang dibagi secara *fair* kepada setiap individu, maka para pemenang layak menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya, dan bagi yang kalah tak ada yang perlu dikutuk selain diri sendiri."[45] Bagi Sandel, ini adalah klaim moral yang melampaui proposisi praktis bahwa adalah hal yang baik kita berprestasi dan profesional dalam pekerjaan dan peran sosial kita. Klaim moral ini adalah sisi gelap meritokrasi. Selama empat dekade globalisasi pasar bebas dan ketimpangan sosial-ekonomi yang dihasilkannya, klaim-klaim meritokratis meracuni politik dan menciptakan polarisasi. Di satu sisi, ini terkait dengan ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan yang terus tumbuh dalam masyarakat pasar kompetitif. Di sisi lain, klaim meritokratis berkaitan dengan sikap dan keyakinan arogan terhadap kesuksesan dan kegagalan individu.

Sandel merumuskan ideologi meritokrasi dalam beberapa tesis berikut. Pertama, inti keyakinan meritokratis adalah pandangan bahwa nasib seseorang menggambarkan prestasi atau jasanya; setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya dan pantas menerima apa yang diperoleh. Dengan keyakinan ini, para pemenang menganggap kesuksesan mereka sebagai hadiah yang adil untuk kapasitas mereka sendiri. Sebaliknya, yang gagal merasa tidak ada yang bisa disalahkan selain diri mereka sendiri.[46] Keyakinan ini menciptakan keangkuhan di antara para pemenang dan beban penghinaan bagi yang kalah. Bagi Sandel, ada dua kontingensi moral yang mendasari penolakan terhadap proposisi meritokratis tersebut yaitu: 1) Berbakat dan berprestasi bukan hasil kerja keras individu belaka, melainkan "*a matter of good luck*", suatu pemberian atau berkat. Berkat tak selalu bermakna teologis. Komunitas di mana seseorang hidup adalah suatu berkat. Sepanjang status moral bakat adalah suatu pemberian, maka adalah sebuah kesalahan untuk berpikir bahwa kesuksesan seseorang adalah hasil kerja keras sendiri; 2) Komunitas adalah berkat sebab mereka yang berbakat hanya bisa mengembangkan bakatnya dalam masyarakat yang menghargai bakat-bakat mereka.[47] Jadi, keyakinan meritokratis adalah keyakinan sombong dari kelompok teratas bahwa mereka pantas menikmati nasib mereka karena kerja keras dan prestasi individu, dan bahwa mereka yang merayap di bawah juga pantas bernasib demikian. Cara pandang yang mendampingi moral politik teknokratis liberal ini memicu gerakan populis reaksioner dari mereka yang gagal dan dihina.

Kedua, Sandel menyebut meritokrasi sebagai retorika tanggung jawab. Menurutnya, sebelum tahun 1980, debat tentang negara kesejahteraan

[45] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 19.
[46] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 33.
[47] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 48.

adalah debat tentang solidaritas atau apa yang kita lakukan sebagai sesama warga negara. Etika solidaritas menjadi bahasa publik politik. Namun setelah 1980, etika solidaritas disingkirkan oleh etika sukses yang menekankan tanggung jawab individu. Hal ini bukan kebetulan melainkan terkait dengan filsafat publik (liberalisme) yang menekankan otonomi individu. Masyarakat liberal seperti AS percaya bahwa orang-orang sukses pantas bernasib baik, dan siapa yang gagal, jelas salah sendiri. Konsep tentang tanggung jawab individu ini adalah petunjuk utama etika meritokratis dalam masyarakat liberal. Menurut Sandel, meyakinkan orang untuk bertanggung jawab adalah hal yang baik. Ini menghormati kapasitas individu untuk berpikir dan bertindak otonom. Namun, bertanggung jawab secara moral dan otonom adalah hal yang berbeda dari inti etika meritokratis bahwa setiap orang sepenuhnya bertanggung jawab atas nasibnya dalam hidup.[48] Jika kesuksesan adalah tanggung jawab individu semata-mata, bagaimana peran orangtua, guru atau dosen yang membantu seseorang berprestasi? Bagaimana dengan lingkungan atau masyarakat yang menghargai bakatnya? Dan jika kegagalan adalah tanggung jawab individu, bagaimana dengan mereka yang telah bekerja keras sepanjang hidup namun nasibnya tidak berubah? Bagi Sandel, keyakinan meritokratis menciptakan arogansi bagi para pemenang serentak penilaian tidak adil terhadap mereka yang tertinggal. Para pecundang ini dianggap layak meratapi kegagalan mereka sebagai sebuah aib.[49] Keyakinan ini menciptakan kebencian terhadap elit dan memicu gelombang reaksi populis.

Ketiga, berdasarkan keyakinan akan tanggung jawab individu, meritokrasi menyerukan retorika kebangkitan. Retorika kebangkitan terangkum dalam slogan bahwa mereka yang bekerja keras dan bermain sesuai aturan dapat bangkit dari ketertinggalan mereka sejauh bakat membawa mereka ke harapan itu. Slogan ini justru didengungkan oleh partai-partai kiri atau partai sosial-demokratik. Bagi Sandel, retorika ini membuat banyak orang toleran terhadap ketidaksetaraan dan kemiskinan. Mereka menghidupkan "iman" meritokratis bahwa apapun titik awal seseorang dalam hidup, adalah selalu mungkin untuk bangkit dari miskin menjadi kaya. Namun menurut Sandel, keyakinan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam globalisasi ekonomi saat ini, tidak mudah untuk bangkit. Orang Amerika yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap miskin sampai dewasa. Dari sebagian besar pendapatan Amerika sejak akhir 1970, 10% mengalir ke kelompok teratas sedangkan separuh kelompok bawah tak menerima apa-apa. Hari ini 1% orang terkaya di AS menguasai keuntungan dan sumber daya lebih dari gabungan seluruh jumlah pendapatan separuh kelompok kelas menengah ke bawah. Apalagi ledakan ketidaksetaraan dalam beberapa dekade terakhir tidak mempercepat

[48] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 179-180.

[49] Sandel, *The Tyranny of Merit*, 119.

mobilitas ke atas tetapi memungkinkan mereka yang berada di atas mengkonsolidasikan keuntungan dan mewariskannya kepada anak cucu mereka. Inilah alasannya mengapa retorika kebangkitan yang didengungkan para elit politik liberal tidak hanya gagal memotivasi kelas pekerja tetapi juga membangkitkan penghinaan dan kebencian. Dalam kondisi ketimpangan struktural yang merajalela dan mobilitas ke atas yang terhenti, mengulangi pesan bahwa kita bertanggung jawab atas nasib kita dan dapat mengubah keadaan asalkan terus bekerja keras hanya menciptakan frustrasi bagi mereka yang tertinggal meskipun telah bekerja keras.[50]

Keempat, keyakinan meritokratis memengaruhi cara kita memandang ketimpangan sosial. Dari perspektif meritokrasi, ketimpangan sosial adalah masalah besar kecilnya akumulasi pendapatan seseorang yang linear dengan kerja kerasnya.[51] Namun Sandel berpendapat, pandangan ini menyederhanakan soal sebab faktanya tak ada hubungan linear antara kerja keras dengan hasil. Sebagian besar dari apa yang dihasilkan saat ini adalah upah yang diberikan oleh pasar, bukan harga atas nilai kerja keras. Jika kerja keras adalah ukuran sukses, seharusnya tukang sampah yang bekerja keras setiap hari bernasib lebih baik. Bagi Sandel, secara moral sulit untuk menjelaskan mengapa sebagian orang pantas mendapatkan imbalan lebih besar dari sistem pasar daripada sebagian lainnya yang mungkin sama-sama pekerja keras. Karena itu, Sandel menolak keyakinan meritokratis bahwa di bawah kondisi yang sama, setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya. Kelemahan meritokrasi adalah meritokrasi hanya berbicara tentang *mobility* dan *fairness*, bukan *equality*. Bagi para meritokrat, sejauh orang telah diberi kesempatan yang sama, maka ketimpangan yang terjadi (pintar dan bodoh, sukses dan gagal, kaya dan miskin) adalah *fair*.[52] Pandangan ini telah memicu penghinaan moral yang diperalat oleh partai populis sayap kanan sebagai materi propaganda politik.

Kelima, meritokrasi menganggap pendidikan sebagai solusi atas ketimpangan sosial. Menurut Sandel, politik progresif liberal dan partai kiri mengatasi ketidaksetaraan tidak dengan mempertanyakan kembali struktur-struktur yang tidak adil melainkan mempertajam retorika mobilitas naik melalui seruan untuk mengejar gelar sarjana. Retorika ini bertepatan dengan fakta bahwa mayoritas orang Amerika, Eropa dan masyarakat demokratis lainnya, diajarkan untuk menghina gagasan hirarki rasial, namun menganggap *fair* hirarki antara orang kaya dan miskin, yang berijazah universitas dan yang tidak. Akibatnya, kelas-kelas profesional secara gampang menghina para pekerja tak bergelar sarjana dengan menganggap mereka sebagai kaum bodoh. Mengutip Thomas Nagel, Sandel mengatakan bahwa ketika ketidakadilan rasial dan seksual berhasil

[50] Sandel, *The Tyranny of Merit*, 72.
[51] Madung, "Krisis Demokrasi," 138.
[52] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 147.

dikurangi, muncul ketimpangan baru yaitu ketimpangan antara kaum pintar dan bodoh. Setelah rasisme dan seksisme dikutuk sebagai kesalahan moral, satu-satunya prasangka moral yang wajar adalah merendahkan orang bodoh dan miskin. Anggapan ini mengikis harga diri sosial para pekerja yang tak bergelar sarjana dan memicu kebencian terhadap elit-elit liberal.[53]

Dengan demikian, dari perspektif Sandel jelas bahwa populisme kanan berakar pada ideologi meritokrasi. Dalam wawancara dengan *The Guardian,* Sandel sendiri mengungkapkan bahwa gerakan populis sayap kanan adalah bentuk pemberontakan melawan tirani meritokrasi.[54] Bertentangan dengan berbagai analisis yang menyoroti fitur-fitur jelek Trump dan para pendukungnya, Sandel justru berpendapat bahwa pemilihan Trump adalah vonis marah terhadap meningkatnya ketidaksetaraan dan penghinaan moral terhadap orang-orang yang merasa bahwa ekonomi dan budaya telah menelantarkan mereka.[55] Bagi Sandel, Trump memainkan politik penghinaan untuk menelanjangi borok kegagalan politik progresif AS sejak 1980-an atau kegagalan partai-partai sosial-demokratik di Eropa dan seluruh dunia dalam mewujudkan visi keadilan sosial. Menurutnya, bukan kebetulan bahwa di tengah meningkatnya tirani meritokrasi selama empat dekade terakhir, politik progresif liberal mengalami kemunduran.

Politik progresif adalah politik yang memperjuangkan *welfare state* dengan membela nasib para pekerja dan melawan hegemoni neo-liberal. Menurut Sandel, selama lebih dari empat dekade, partai-partai sosial-demokratik menjadi agen cita-cita neo-liberalisme dan visi pasar bebas. Hal ini menyimpang dari misi tradisional mereka: menjadi kekuatan penyeimbang dalam demokrasi menghadapi ketimpangan yang disebabkan oleh kapitalisme tak terkendali. Sandel berpendapat, di Amerika dan Eropa, partai-partai buruh gagal menghambat bahaya neo-liberalisme dan malah menerima kekuatan neoliberal ke dalam sepak terjang politik mereka dengan hati bulat. Maka, janji-janji meritokratis kini justru ditawarkan oleh partai-partai kiri. Ini menjelaskan, mengapa partai-partai kiri yang semula bertumpu pada rakyat kecil sebagai basis massanya, sekarang ini dikerumuni elit-elit profesional. Dengan demikian, gelombang populisme kanan adalah gejala kegagalan politik progresif yang dibarengi oleh tirani meritokrasi. Bagi Sandel, tidak cukup kita memobilisasi protes dan kecaman terhadap para tokoh populis kanan dan massa pendukungnya sebagai rasis, xenofobik, misoginis atau fanatik secara religius. Kita juga memerlukan

[53] Sandel, *The Tyranny of Merit*, 173 & 179.

[54] Julian, Coman. "Michael Sandel: The Populist Blacklash has been a revolt against the tyranny of merit." https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populistbacklash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit (diakses 6 September 2021).

[55] Sandel, "Populism," 354.

sebuah politik yang sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami kemarahan moral, frustrasi dan kekecewaan dari orang-orang yang kehilangan penopang bagi harga dirinya.[56]

Gerakan Populis di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Laporan *The Economist Intelligent Unit* (2020) menempatkan demokrasi di Indonesia dalam kategori "demokrasi cacat". Salah satu penyebabnya adalah polarisasi di sepanjang jalur patahan sosial keagamaan.[57] Dalam hampir satu dekade terakhir, publik Indonesia akrab dengan istilah seperti Islam pluralis versus radikal, cebong versus kadrun. Polarisasi ini terus meningkat sejak tiga kontestasi elektoral utama: pemilu Presiden 2014, pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 dan pemilu Presiden 2019.[58] Permainan politik identitas dan mobilisasi kekuatan Muslim konservatif dalam tiga kontestasi tersebut adalah indikasi populisme kanan di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh institut PWD (*Power, Welfare, and Democracy*) Universitas Gajah Mada menunjukkan bahwa 47% aktor politik utama dan 31% aktor cadangan menerapkan populisme sebagai strategi politik untuk memobilisasi dukungan massa.[59] Muncul anggapan bahwa berbeda dari populisme di Eropa dan Amerika, populisme di Indonesia tidak memiliki program yang jelas. Karena itu, populisme di Indonesia belum mengancam demokrasi.[60] Meskipun anggapan tersebut ada benarnya, potensi berbahaya populisme, terutama tendensi totalitariannya bagi demokrasi dan kampanye masif yang memperkuat politik identitas, tidak dapat diremehkan.

Menurut Hadiz dan Robison, ada dua model populisme di Indonesia yaitu *Islamic Populism* dan *Secular Nationalist Populism*. Populisme Islam menunjuk kepada gerakan konservatif yang didorong oleh visi pemurnian masyarakat melalui nilai-nilai keislaman. Sedangkan populisme nasionalis sekular adalah sentimen anti-asing, anti-globalisasi, dan anti-*establishment*.[61] Fokus pembahasan ini adalah populisme Islam sebab sebagaimana menurut Hadiz dan Robison, populisme Islam lebih menonjol di antara gerakan populis yang bersaing di Indonesia.[62]

---

[56] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 102-104.

[57] Usman Hamid, "Merosotnya Ruang Publik untuk Kritik dan Protes," dalam *Demokrasi Tanpa Demos* diedit oleh Wijayanto et al. (Jakarta:LP3ES, 2021), 699.

[58] Djayadi Hanan, "Identity Politics in the 2019 Indonesian General Elections: Its Significances and Limitation," *Jurnal Wacana Politik* 5, no. 1 (2020), 16.

[59] Otto G. Madung and A. Y. Mai, "Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization," *Politika* 13, no. 1 (2021), 136.

[60] Hara, "Populism in Indonesia," 106.

[61] Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia," *International Political Science Review* 38, no. 4 (2017), 493.

[62] Hadiz and Robison, "Competing Populism," 488.

Populisme Islam adalah pengarusutamaan Islam dalam memobilisasi massa yang terjadi bukan lewat *the people* melainkan *the ummah*. Gerakan *Arab Spring* menunjukkan bahwa seruan *the ummah* untuk menggantikan *the people* memiliki pengaruh efektif yang hampir sama di berbagai masyarakat mayoritas Muslim. Di Mesir dan Tunisia misalnya gerakan Islam bawah tanah berhasil memobilisasi dukungan massa dan memenangkan pemilu. Karena itu, pendapat Hadiz betul bahwa evolusi populisme di tengah perkembangan neo-liberalisme tidak cukup memandang *populus* sebagai *the people*. Dalam masyarakat mayoritas Muslim seperti Timur Tengah dan Indonesia, populisme bermitra dengan Islam, sehingga apa yang disebut neo-populisme di Indonesia adalah populisme Islam itu sendiri. Menurut Hadiz, jika secara tradisional, *ummah* dipahami sebagai istilah supranasional, dalam populisme Islam, *ummah* mengembangkan wawasan kebangsaan yang meningkat seiring berkembangnya gerakan-gerakan Islam yang melawan pemerintahan yang dianggap korup dan merugikan umat Islam.[63] Rakhmani dan Saraswati (2021) menambahkan bahwa di Indonesia, narasi populis otoriter dikonstruksi dengan cara berbeda-beda di mana *ummah* bersatu dengan "elit lama" yang didukung oleh lingkaran ulama Muslim dalam melawan pendukung "elit baru" yang ditopang partai-partai politik besar.[64]

Identifikasi politik Islamis sebagai populisme Islam relatif baru di Indonesia. Meski demikian, kemunculan populisme Islam merupakan klimaks pembentukan kelompok-kelompok Islam sejak kemerdekaan 1945 hingga reformasi 1998. Walaupun ada perbedaan fundamental di antara mereka, kelompok-kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), atau Salafi yang didukung Arab Saudi, sama-sama menggunakan keterbukaan baru dari transisi demokrasi untuk memantapkan diri mereka sebagai aktor penting dalam arena politik identitas berbasis *ummah*.[65] Djani menyebut tiga ciri populisme Islam di Indonesia: pertama, *ummah* menggantikan *demos*; kedua, pembentukan khilafah adalah kecenderungan umum populisme Islam; ketiga, populisme Islam mengedepankan penguatan identitas dengan mengeksploitasi simbol-simbol religius. [66] Dengan demikian, fanatisme religius yang ditelikung demi ambisi politik memainkan peran sentral dalam populisme di Indonesia.

Tanpa mengabaikan perspektif tersebut, ada baiknya gagasan Sandel dipertimbangkan untuk melihat sisi lain populisme Islam. Seperti kata

[63] Vedi R. Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East* (UK: Cambridge University Press, 2016), 12.

[64] Rakhmani and Saraswati, "Authoritarian Populism," 456.

[65] Marcus Mietzner, "Fighting Illiberalism with Illiberalism, Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia," *Pasific Affairs* 91, no. 2 (Juni 2018), 267.

[66] Luky Djani, "Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme," *Prisma* 36, no.1 (2012), 18.

Sandel, adalah sebuah kesalahan jika hanya fokus pada fanatisme religius dan rasisme, dan melupakan hal penting yaitu populisme sebagai reaksi atas politik yang mengakomodasi kepentingan kelas profesional dan meninggalkan kelas pekerja.[67] Dari perspektif Sandel, meningkatnya populisme Islam tentang pentingnya moralitas Islam sebagai jalan menuju keadilan bertepatan dengan tingginya ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Perspektif tersebut didukung oleh sejumlah penelitian mutakhir bahwa kebangkitan populisme Islam terkait erat dengan ketidakpercayaan yang meluas terhadap institusi sosial, politik dan ekonomi. Menurut Inglehart dan Norris, sebagaimana dikutip Djani, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ekonomi memantik ideologi ekstrem yang memberi alternatif atas turbulensi sosial, politik dan ekonomi.[68] Populisme Islam adalah salah satu bentuk ideologi ekstrem tersebut. Singkatnya, populisme Islam merupakan "simptom dan tanggapan terhadap dislokasi neo-liberalisme dan krisis representasi dalam konteks absennya gerakan politik progresif."[69] Di Indonesia, politik progresif bukan hanya gagal tetapi juga absen. Sebagai akibat Perang Dingin, politik progresif atau proyek politik berbasis kelas pekerja dan ide keadilan sosial telah lenyap, sedangkan oligarki menguat. Seperti analisis Sandel, kegagalan politik progresif adalah kebangkitan kapitalisme pasar. Dalam konteks Indonesia, dampak Perang Dingin adalah penghilangan secara masif-anarkis PKI dan segala afiliasi politik kiri di bawah cengkeraman rezim totaliter Orde Baru. Setelah PKI bubar, hampir tidak ada lagi organisasi politik yang menggemakan ideologi politik berbasis kelas pekerja.[70]

Dengan absennya politik progresif, politik identitas sebagai elemen penting populisme baru cenderung mengarah ke kanan dengan watak xenofobik, rasial, fanatik dan intoleran. Memakai kata-kata Laclau, nihilisme ideologis tumbuh seiring dengan matinya politik kiri-progresif. Populisme Islam adalah salah satu bentuk nihilisme ideologis tersebut. Absennya politik progresif memicu keyakinan kelompok-kelompok radikal agama (Islam) bahwa negara harus diatur menurut hukum Tuhan dan moralitas agama. Pemimpin populis Islam seperti Rizieq Shihab yakin bahwa dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, keadilan akan terwujud. Dalam konteks itu, populisme Islam diklaim sebagai ideologi pembebasan yang berupaya mewujudkan redistribusi sumber daya dari kelompok elit ke *ummah* sebagai representasi kelompok marginal.

Tidak berhenti pada analisis tentang absennya politik progresif, gagasan Sandel tentang meritokrasi memberi perspektif baru dalam memahami populisme di Indonesia. Globalisasi pasar dewasa ini bukan saja globalisasi

[67] M. Sandel, "How to Save Democracy," *New Statesman*, 18-24 May 2018, 32.

[68] Djani, "Persenyawaan Politik Identitas," 16.

[69] Mudhoffir, dkk., "Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia," *Prisma* 36, no.1 (2017), 48.

[70] Sunardi, "Islamic Populism: Asymmetrical, Multi-Class Coalition-Based Social Mobilization," *Jurnal Politik* 4, no. 2 (Februari 2019), 334.

modal dan hegemoni neoliberal. Ada hal yang lebih mencemaskan yaitu globalisasi moral yang congkak. Para pemenang kompetisi pasar bebas yakin bahwa mereka pantas menghirup kesuksesan dan kekayaan mereka karena prestasi individual, sementara kegagalan orang-orang miskin adalah kesalahan sendiri. Akibatnya, kini masyarakat Indonesia dihargai menurut standar pasar: jika seseorang menghasilkan banyak uang, dia dihormati. Jika tidak, dia dihina. Pekerjaan dihormati atau tidak bergantung pada gelar pendidikan dan akumulasi pendapatan. Tidak heran, akhir-akhir ini, banyak pemimpin politik yang secara terang-terangan menghina orang-orang bodoh dan miskin seperti Megawati yang menghina tukang bakso,[71] atau mantan gubernur NTT, Victor Laiskodat, yang mengolok-olok orang miskin dan orang bodoh.[72] Moral congkak semacam ini sedang menyebar. Seperti tesis Sandel, bukan kebetulan bahwa keyakinan moral congkak ini menguat seiring meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Karena itu, keangkuhan meritokrasi juga merupakan pemicu populisme di Indonesia. Studi yang dibuat oleh Rakhmani dan Saraswati menunjukkan bahwa kesenjangan besar dalam pendidikan di antara generasi muda, keharusan menghadapi fleksibilitas pasar yang berlebihan, serta mobilitas ke atas yang terhenti menimbulkan frustrasi bagi kelompok Muslim kelas menengah ke bawah di Indonesia. Studi mereka menemukan bahwa mobilisasi masif kelompok Muslim kelas menengah ke bawah untuk menuntut Ahok diadili pada 2017 melibatkan 97,5% massa yang pendidikan terakhirnya SMA. Sebagian besar dari mereka frustrasi karena mobilitas sosial yang dijanjikan pendidikan modern untuk kelas bawah tidak disertai perbaikan kondisi material, dan malah memicu pandangan yang menuduh mereka sebagai penyebab ketertinggalan mereka.[73] Selain itu, retorika meritokratis tentang mobilitas naik dengan prinsip "kerja, kerja, kerja" gagal menginspirasi mereka yang merayap di bawah ketika fakta di lapangan memperlihatkan ketimpangan yang semakin parah. Penelitian yang dilakukan SMERU Institute pada tahun 2015 dan 2019 menunjukkan bahwa ketika dewasa, selisih pendapatan anak-anak keluarga miskin di Indonesia 87% lebih rendah dibandingkan anak-anak keluarga kaya.[74]

---

[71] Ardhito Ramadhan dan Icha Rastika. "Megawati Jadikan Tukang Bakso Lelucon, Pengamat: Tak Pas Disampaikan Ketum Partai Besar." 23 Juni 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/15090021/megawati-jadikan-tukang-bakso-lelucon-pengamat-tak-pas-disampaikan-ketum, diakses pada 21 September 2023.

[72] Dedy Priatmojo, "Gubernur NTT Victor Laiskodat Dikecam Usai Mengolok-olok Orang Miskin," 16 Agustus 2023, https://www.viva.co.id/berita/nasional/1628187-gubernur-ntt-victor-laiskodat-dikecam-usai-mengolok-olok-orang-miskin;https://regional.kompas.com/read/2018/11/28/06270431/gubernur-ntt-orang-bodoh-dan-miskin-tidak-akan-masuk-surga, diakses pada 18 Oktober 2023.

[73] Rakhmani dan Saraswati, "Authoritarian Populism," 439.

[74] Rendy A. Diningrat, "Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin ketika Dewasa: Penjelasan Temuan Riset SMERU," *The Conversation*, 3 Desember 2019. https://theconversation.com/mengapaanak-dari-keluarga-miskin-cenderung-akan-tetap-miskin-ketika-dewasa-penjelasan-temuan-riset.

Jadi, bahaya prinsip meritokrasi bagi demokrasi di Indonesia ialah prinsip tersebut mengabaikan konsepsi manusia sebagai makhluk sosial dan politis yang mencari pengakuan dan kebaikan bersama, bukan kekayaan, rasa puas diri, arogansi dan dominasi atas orang lain. Prinsip meritokrasi yang merupakan wajah lain liberalisme dalam politik sekular menghancurkan kemungkinan hidup bersama dengan fokus pada hak-hak subjektif.[75] Dalam konteks Indonesia, patut dipertimbangkan bahwa reaksi-reaksi populis beberapa tahun terakhir juga didorong oleh kebencian terhadap asumsi meritokratis bahwa mereka yang mendarat di atas pantas menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya, sementara bagi yang merayap di bawah tak ada yang perlu dikutuk selain diri mereka sendiri.

Revitalisasi Diskursus Publik

Sandel menutup prolog *The Tyranny of Merit* dengan mengatakan bahwa harapan akan pembaruan kehidupan bersama bergantung pada bagaimana masyarakat memahami ikatan sosial dan respek satu sama lain yang telah memudar selama empat dekade terakhir. Racun tirani meritokrasi yang mendorong gerakan populis juga mendorong warga negara kepada polarisasi dan krisis solidaritas.[76] Karena itu, menjawab tantangan populisme kanan, Sandel menganjurkan revitalisasi diskursus publik.

Revitalisasi diskursus publik adalah peninjauan kembali premis-premis liberalisme kontemporer. Revitalisasi diskursus publik menawarkan dua gagasan pokok. Pertama, perlunya mengembalikan perdebatan konsep hidup baik ke dalam politik sebagai antitesis prinsip penghindaran (netralitas) liberal. Bagi Sandel, strategi penghindaran liberal kekurangan sumber daya moral, retorik dan simpatik untuk memahami penghinaan yang dialami kelas pekerja dan pemilih kelas menengah ke bawah. Strategi ini mengalihkan semua perdebatan publik dan ketidaksepakatan moral tentang masyarakat yang adil kepada mekanisme pasar. Bagi Sandel, ini menciptakan wacana publik yang sempit, elitis dan tidak responsif terhadap keluhan moral dari bawah. Untuk menciptakan kembali politik yang lebih demokratis dan merespons reaksi populis, diperlukan upaya "menemukan jalan menuju wacana publik yang kuat secara moral, yang menghormati pluralisme dengan terlibat dalam berbagai ketidaksepakatan moral, bukan menghindarinya."[77] Sandel menyebutnya sebagai *politics of moral engagement* yaitu politik yang terbuka terhadap berbagai konsep hidup baik dalam merumuskan keadilan sehingga diskursus publik tidak dikuasai oleh teknokrasi tetapi sanggup menampung keluhan moral dari mereka yang kalah dan frustrasi.[78] Untuk melawan arogansi meritokrasi, Sandel

[75] Adrian Pabst, "On the Convergence of Liberalism and Populism," *Telos* 2018, no. 185 (2018), 203.
[76] Sandel, *The Tyranny of Merit*, ii.
[77] Sandel, "Populism," 358.
[78] Stuart Rosenbaum, *Race, Justice and American Intellectual Traditions* (USA: Palgrave Pivot, 2018), 75.

mendorong agar politik terbuka terhadap konsep hidup baik seperti kemurahan hati, kerendahan hati, rasa terima kasih, respek, dan pengakuan. Dibandingkan gagasan liberal tentang *unencumbered-self* yang cukup diri, nilai-nilai tersebut lebih kuat mendorong individu kepada solidaritas dan kesadaran akan keterhubungannya dengan komunitas.

Kedua, perlunya memahami keadilan sebagai keadilan kontributif. Sejak Rawls, keadilan selalu dipahami sebagai keadilan distributif yaitu bagaimana institusi negara, terutama norma-norma dasarnya, dapat mendistribusikan hak-hak, peluang dan keuntungan sosial secara adil. Menurut pandangan ini, mekanisme pasar mampu merealisasikan tujuan tersebut. Caranya, globalisasi pasar bebas dibiarkan asalkan para pemenang memberi kompensasi bagi yang kurang beruntung melalui pajak. Namun, bagi Sandel, di satu sisi, globalisasi pasar justru memperparah ketidaksetaraan sebab hampir semua keuntungan dari pertumbuhan ekonomi direbut oleh kelompok teratas. Sebagian besar masyarakat bawah tidak melihat adanya perbaikan atas kondisi mereka bahkan setelah pajak berjalan. Di sisi lain, mengukur kebahagiaan warga negara secara teknokratis berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi gagal memahami isu moral dan kultural seperti kebutuhan akan respek atas martabat kerja manusia. Bagi Sandel, inilah alasannya mengapa dalam beberapa dekade terakhir, para elit politik sulit memahami gelombang ketidakpuasan dan frustrasi dalam populisme kanan.[79]

Mengatasi kekurangan tersebut, Sandel mengusulkan wacana keadilan kontributif. Keadilan kontributif adalah suatu konsep tentang masyarakat yang baik yang dapat dicapai melalui pengakuan sosial dan respek atas martabat kerja manusia. Menurut Sandel, dari Aristoteles hingga tradisi republik AS, dari Hegel hingga ajaran sosial Gereja Katolik, teori keadilan kontributif mengajarkan bahwa seseorang menjadi manusia sepenuhnya ketika mendapatkan respek dari orang lain atas pekerjaan dan kontribusinya. Bagi Sandel, kerja tidak semata-mata bernilai ekonomis, tetapi juga sosial, etis dan kultural. Sandel mengutip ensiklik Paus Yohanes Paulus II, *Laborem Exercens* (1981) tentang pekerjaan manusia, terutama pernyataan bahwa melalui kerja, manusia dapat mencapai kepenuhan sebagai manusia. Sandel juga mengambil pandangan Hegel bahwa lebih daripada sekadar sistem pemuasan kebutuhan individu secara efisien, pasar kerja sejatinya adalah suatu sistem pengakuan.[80] Respek atas martabat kerja manusia, terlepas dari tingkat pendidikannya, adalah cara melawan arogansi meritokratis dan penghinaan yang diciptakannya bagi mereka yang merasa tertekan oleh desakan globalisasi. Hal ini dapat meredam gerakan murka populisme kanan.

---

[79] Michael Sandel, "What Liberals Get Wrong about Work," *The Atlantic*, 2 September 2020. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/contributive-justice-and-dignity-work/615919/ (21 September 2023).

[80] Sandel, *The Tyranny of Merit,* 195-197.

Kesimpulan

Populisme kanan adalah momok bagi negara-negara demokrasi di dunia. Mengapa populisme kanan bangkit dan bagaimana menghadapi tantangannya? Artikel ini telah menunjukkan bahwa dari perspektif Sandel, kebangkitan populisme kanan berakar pada tirani meritokrasi bertepatan dengan kegagalan proyek politik progresif selama beberapa tahun terakhir. Gagasan meritokratis bahwa para pemenang kompetisi ekonomi global berhak menghirup kesuksesan mereka sepuas-puasnya dan bagi yang kalah tak ada yang perlu dikutuk selain diri mereka sendiri, telah menciptakan polarisasi sosial dan menyebarkan penghinaan di antara mereka yang kalah. Karena itu, akar populisme kanan bukan semata-mata tendensi iliberal seperti fanatisme agama dan rasisme, atau sentimen anti-globalisasi, melainkan terutama tirani meritokrasi. Meritokrasi menghancurkan solidaritas sebagai basis etis demokrasi yaitu bahwa "Kita mungkin datang dengan kapal berbeda, tetapi kita berada dalam perahu yang sama sekarang."[81]

Meritokrasi ditopang oleh pandangan liberalisme kontemporer tentang tanggung jawab individu dan peluang yang *fair*. Alih-alih netral, liberalisme mempromosikan konsepsi tertentu tentang kebaikan yang berpihak pada kelas atas berpendidikan universitas dan mengurung kelas pekerja dalam frustrasi dan rasa terhina. Untuk mengatasi populisme kanan, ruang publik perlu terbuka terhadap berbagai ketidaksepakatan moral yang mencirikan masyarakat kontemporer, merefleksikan pertanyaan tentang identitas nasional dan martabat pekerjaan manusia, serta membiarkan konsep hidup baik seperti kerendahan hati dan solidaritas menjadi basis etis demokrasi. Ini membantu menumbuhkan rasa memiliki kebaikan bersama dan solidaritas kolektif yang dapat melawan racun keangkuhan meritokrasi. Dengan cara ini, demokrasi baik di negara-negara maju seperti AS dan negara-negara di Eropa, maupun di negara berkembang seperti Indonesia, aman dari ancaman populisme kanan.

Daftar Pustaka

Agustin, Oscar Garcia. *Left-Wing Populism, The Politics of the People.* UK: Emerald Publishing, 2020.

Anderson, Ben and Anna Secor. "Propositions on right-wing populism: Available, excessive, optimistic." *Political Geography* 96 (2022): 1-10.

Bergh, Andreas and A.Karna. "Globalization and Populism in Europe." *Public Choice* 189, no. 51 (2021): 51-70.

Colantone, I., dan Stanig, P., "The trade origins of economic nationalism: Import competition and voting behavior in Western Europe." *American Journal of Political Science* 62, no. 4 (2018): 940-55.

[81] Slavoj Zizek, *Pan(dem)ic Covid-19 Shakes the World* (New York & London: OR Books, 2020), 15.

Coman, J. "Michael Sandel: The Populist Blacklash has been a revolt against the tyranny of merit."https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the populistbacklash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit (6 September 2023).

D. Autor, Dorn, D., Hanson, G., & Majlesi, K. "Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure." *American Economic Review* 110, no. 10 (2020): 3135-50.

Diningrat, Rendy A. "Mengapa Anak dari Keluarga Miskin Cenderung akan Tetap Miskin ketika Dewasa: Penjelasan Temuan Riset SMERU." *The Conversation*, 3 Desember 2019. https://theconversation.com/mengapaanak-dari-keluarga-miskin-cenderung-akan-tetap-miskin-ketika-dewasa-penjelasan-temuan-riset.

Djani, Luky. "Persenyawaan Politik Identitas dan Populisme." *Prisma* 36, no. 1 (2012): 10-18.

Guisan, Catherine. "Right-Wing Populism and the European Parliament's Agonistic Politics." *Populism* 5, no. 1 (2022): 48-71.

Haak, Donovan and Dries Deweer. "Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy." *Populism* 5, no. 1 (2022): 21-47.

Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. UK: Cambridge University Press, 2016.

Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. "Competing Populism in Post-authoritarian Indonesia." *International Political Science Review* 38, no. 4 (2017): 488-502.

Halterman, Andrew, Nicholas Halterman dan Jill Irvine. "How Right Wing is Right Wing Populism?" *Political Science* 22 (2018), 51-65.

Hamid, Usman. "Merosotnya Ruang Publik untuk Kritik dan Protes." *Demokrasi Tanpa Demos* diedit oleh Wijayanto, et al. Jakarta: LP3ES, 2021.

Hanan, Djayadi. "Identity Politics in the 2019 Indonesian General Elections: Its Significances and Limitation." *Jurnal Wacana Politik* 5, no. 1 (2020): 1-16.

Hara, Abubakar Eby. "Populism in Indonesia and its Threats to Democracy." *Proceedings of the Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017).* 106-111. Dordrecht: Atlantis Press, 2018.

Hardiman, F. Budi. "Kebangkitan Populisme Kanan dalam Negara Hukum Demokratis." *Prisma* 36, no.(2017), 3-9.

Laclau, E. *Politics and Ideology in Marxist Theory.* London: NLB, 1977,

Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. *How Democracy Die*. UK: Penguin Books, 2018.

Lutjen, Torben. "The anti-authoritarian revolt: Right-wing populism as self-empowerment?" *European Journal of Social Theory* 25, no. 1 (2022): 75-93.

Madung, Otto. "Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Jurnal Ledalero* 9, no. 2 (2020): 127-144.

Madung, Otto., and A. Y. Mai. "Populism, Radical Democracy, and the Indonesian Process of Democratization." *Politika* 13, no. 1 (2021): 131-148.

Mietzner, Marcus. "Fighting Illiberalism with Illiberalism, Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia." *Pasific Affairs* 91, no. 2 (Juni 2018): 261-282.

Mouffe, C. *Populisme Kiri* diterjemhakan oleh Melfin Zaenuri. Yogyakarta: Antinomi, 2018.

Mudde, C., dan Cristobal Rovira Kaltwasser. *Populism A Very Schort Introduction*. USA: Oxford University Press, 2017.

Mudhoffir, et al. "Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia." *Prisma* 36 (2017): 48-59.

Osnos, E. "China's Encounter with Michael Sandel." dalam *Encountering China. Michael Sandel and Chinese Philosophy*, diedit oleh M. Sandel dan Paul J. D'Ambrosio, vii - xv. Massachusets: Harvard University Press, 2018.

Pabst, Adrian. "On the Convergence of Liberalism and Populism." *Telos* 2018, no. 185 (2018), 201-204.

Panizza, Fransisco. "Introduction: Populism and the Mirror of Democracy." dalam *Populism and the Mirror of Democracy*, diedit oleh Fransisco Panizza, 1 - 31. London: Verso, 2005.

Rakhmani, I., and M.S.Saraswati. "Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 3 (2021): 436-460.

Rawls, J. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 2009.

Rizkimawati, Dinda dan Indra Kusumawardhana. "State and Right-Wing Populism: Analysis on the Kemenko Polhukam RI Persuasion Approach in Responding the Wave of "212" Movement." *Journal of Islamic World and Politics* 5, no.1 (2021): 14-34.

Rodrik, Dani. "Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism." *Annual Reviews* 13 (2021): 133-170.

Rosenbaum, Stuart. *Race, Justice and American Intellectual Traditions*. USA: Palgrave Pivot, 2018.

Sandel, Michael. *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?* USA: Farrar, Straus and Giroux, 2020.

Sandel, Michael. "Populism, Liberalism and Democracy." *Philosophy and Social Criticism,* Vol. 44(4) (2018): 353-359.

Sandel, Michael. *Public Philosophy: Essay on Morality in Politics*. Massacusets: Harvard University Press, 2005.

Sandel, Michael. *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*. Massachusets: Harvard University Press, 1996.

Sandel, Michael. *Liberalism and The Limit of Justice*. USA: Cambridge University Press, 1998.

Sandel, Michael. "The Procedural Republic and The Unencumbered Self." *Political Theory* 12, no. 1 (1984): 81-96.

Sandel, Michael. "How to Save Democracy," *New Statesman*, 18-24 May 2018, 32-34.

Sandel, Michael. "What Liberals Get Wrong about Work." *The Atlantic*, 2 September 2020. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/contributive-justice-and-dignity-work/615919/ (diakses 21 Desember 2020).

Sunardi. "Islamic Populism: Asymmetrical, Multi-Class Coalition-Based Social Mobilization." *Jurnal Politik* 4, no. 2 (Februari 2019): 329-338.

Swank, Duane dan Hans-Georg Betz. "Globalization, the Welfare State, and Right Wing Populism in Western Europe," *Socio Economic Review* 1, no. 2 (2003): 215-245.

The Decision Lab. "Michael Sandel, The Celebrity Political Philosopher." https://thedecisionlab.com/thinkers/philosophy/michael-sandel/ (20 September 2023).

Winberg, Oscar. "Insult Politics: Donald Trump, Right-Wing Populism, and Incendiary Language." *European Journal of American Studies* 12, no. 2 (2017): 1-16.

Young, M. *The Rise of Meritocracy 1870-2033, An Essay on Education and Equality*. London: Penguin Books, 1961.

Zizek, Slavoj. *Pan(dem)ic Covid-19 Shakes the World*. New York & London: OR Books, 2020.